

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan pelaku Usaha Kecil dan Menengah di pasar Balige. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana mensejahterakan para pelaku usaha kecil dan menengah yang mana usaha kecil dan menengah menjadi pusat perhatian karena kontribusinya yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toba dalam mengatasi permasalahan sosial pada masyarakat, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah salah satunya dengan pemberdayaan para pelaku usaha yang ada di pasar Balige menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, usaha kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Usaha kecil dan menengah dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis, karena industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor usaha kecil dan menengah dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja jika dengan dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar, kontribusi usaha kecil dan menengah dalam pembentukan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) cukup signifikan.

Berdasarkan hasil pra-penelitian bahwa usaha kecil dan menengah yang ada di pasar Balige Kecamatan Balige, Kabupaten Toba belum berjalan secara efektif dan sulit berkembang secara maksimal. Karena kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung berlangsungnya transaksi jual beli diantaranya lapak yang kurang banyak kamar mandi yang kurang bersih tempat sampah yang kurang besar dan jalanan yang dipenuhi dengan genangan air, oleh karena itu banyak para pelaku usaha kecil dan menengah berjualan di pinggir jalan atau di trotoar sehingga mengakibatkan arus lalu lintas terhambat.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengupayakan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi agar bisa menghadapi pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Adapun kerangka berpikir tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan (DISPERINDAG) dalam Memberdayakan Pelaku Usaha**

Kecil dan Menengah (UKM) di Pasar Balige, Kecamatan Balige Kabupaten Toba”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Pasar Balige Kabupaten Toba
- b. Bagaimanakah Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah di pasar Balige Kabupaten Toba

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Pasar Balige Kabupaten Toba
- b. Untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian Perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah di pasar Balige Kabupaten Toba

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang Usaha Kecil dan Menengah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah gejala-gejala ekonomi yang ada di dunia nyata berdasarkan teori-teori yang pernah diperoleh, adapun temuan penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk meneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peranan

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, (2009. 212- 213) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

2.1.2 Pemberdayaan

Secara etimologis, pemberdayaan adalah terjamahan dari kata empowerment, yang berasal empower yang mengandung dua pengertian : memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas pada pihak lain usaha untuk memberikan kemampuan.

Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu social tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi social. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- 1). Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun
- 2). Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Masih tentang konsep pemberdayaan, Sumodiningrat (1996), mengemukakan “ada dua pengertian pemberdayaan yang saling terkait,

masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. “pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya.”

Upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi :

1. menciptakan susunan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, lapangan pekerjaan dan pasar.
3. pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti mencegah dan melindungi masyarakat dari kesenjangan ekonomi serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha ini dimaksudkan adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh

kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian.

Edi Suharto (1998:220) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas seharinya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
2. Pendekatan Mezzo, pemberdayaan dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strataegi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
3. Pendekatan Makro, pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang luas, perumusan kebijakan, perencanaan social, kampanye, aksi social, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya mempunyai nilai kesetaraan, bahwa masyarakat juga harus diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluaasi, sehingga masyarakat dapat memelihara keberlanjutan kegiatan dan dapat mempertanggungjawabkan

secara terbuka apa yang telah diputuskan bersama. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat semestinya memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Syarat dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, selain peluang dan akses yang sama. Konsekuensinya, masyarakat harus berdaya berperan serta dalam pembangunan. Maka adalah sebuah keharusan memulai konsep pembangunan tersebut dengan apa yang dinamakan dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan (sustainable).

Berdasarkan pendapat diatas maka pemberdayaan dapat dikatakan berjalan dengan baik jika dapat memenuhi pendekatan-pendekatan dari pemberdayaan itu sendiri.

Pendekatan tersebut meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan yang dilakukan agen pemberdaya terhadap masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan pemberdayaan yaitu menjadikan masyarakat yang kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya.

2.1.3 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan menurut Chabib Soleh (2014) menjelaskan secara rinci untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut, terdapat beberapa sasaran antara lain yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan, hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui beberapa perbaikan kelembagaan, berbagai inovasi social yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan hasil produktifitas masyarakat.
2. Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan
3. Perbaikan lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ini bukan saja mengancam dirinya, tetapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
4. Perbaikan akses, baik berkenaan dengan akses inovasi tekhonologi, permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energy listrik yang sangat diperlukan dalam akses produksi. Demikian pula tidak kalah pentingnya perbaikan akses pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik.
5. Perbaikan tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermanfaat.
6. Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing.
7. Perbaikan bidang lainnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada sebuah lingkungan masyarakat.

Pendapat mengenai tujuan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Soleh dapat dipahami, bahwa proses pemberdayaan mempunyai tujuan sebagai sebuah strategi peningkatan produktifitas masyarakat agar lebih meningkatkan kualitas hidupnya melalui beberapa perbaikan yang menyangkut aspek ekonomi, fisik, mental, politik, keamanan dan social budaya.

2.1.2 Prinsip Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Prinsip Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang prinsip Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2.1.3 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang banyak dilakukan sebanyak orang di Indonesia. Usaha kecil dan menengah mulai berkembang dengan pesat setelah terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan pada tahun 1997 di Indonesia. Usaha kecil dan menengah dianggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia ketika krisis moneter. Usaha kecil dan menengah dianggap sebagai penyelamat ekonomi karena usaha kecil dan menengah dapat berperan untuk mengurangi pengangguran dan mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu usaha kecil dan menengah juga banyak berkontribusi terhadap pendapatan daerah maupun Negara.

Menurut keputusan Presiden RI No.99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UKM di Indonesia

sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja.

Adapun pengertian Usaha Kecil dan Menengah dan Industri Kecil menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Adapun pengertian Usaha Kecil dan Menengah menurut Suhardjono (2010) mendefinisikan Usaha Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5-19 sebagai usaha kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20-99 sebagai industry menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai usaha besar.

Menurut M Kwartono berpendapat tentang pengertian Usaha Kecil dan Menengah, merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan rakyat yang menghasilkan kekayaan bersih maksimal 200 juta. Namun yang harus diingat, tanah serta bangunan yang dijadikan tempat usaha tidak ikut diperhitungkan dalam hal ini.

Usaha Kecil dan Menengah menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan yaitu merupakan kelompok industri. Baik itu industri modern, industri tradisional, maupun kerajinan. Di mana omset yang mampu dihasilkan oleh industri tersebut mencapai dibawah 70 juta rupiah.

Istilah industry kecil diartikan sebagai suatu segmen pengusaha dengan usahanya dilihat dari permasalahan ekonomi domestik (Faisal,2002).

2.1.4 Fungsi dan Peran Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Adapun fungsi dan peran usaha kecil dan menengah diantaranya adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerap tenaga kerja pemeretaan pendapatan, nilai tambah produk bagi daerah, peningkatan taraf hidup. Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industry kecil bukan saja penting sebagai jalur kearah pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi juga sebagai unsur pokok dari seluruh struktur industry di Indonesia, karena investasi yang kecil dapat berproduksi secara efektif dan dapat menyerap tenaga kerja.

2.1.5 Ciri- Ciri Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah di dalam pelaksanaannya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini bertujuan untuk dapat membedakan Usaha Kecil dan Menengah dengan jenis usaha lainnya. Disebabkan karena Usaha Kecil dan Menengah sendiri merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan jenis usaha biasanya.

yang menjadi ciri-ciri dari Usaha Kecil dan Menengah diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sistem pembukuan. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha kecil tidak dapat atau sulit mendapat bantuan kredit dari perbankan.
2. Sulit untuk dalam meningkatkan atau juga memperbesar skala usahanya. Hal tersebut terjadi disebabkan karena biasanya teknologi yang digunakan memiliki sifat semi modern, bahkan juga ada yang mengerjakan usaha kecil dengan secara tradisional (tanpa teknologi).
3. Tidak terlibat dalam aktivitas / kegiatan ekspor-impor.
4. Modal yang dimiliki jumlahnya terbatas.
5. Pemilik usaha kecil tidak dapat membayar gaji pegawai dalam jumlah besar.
6. Biaya produksi per unit lebih tinggi disebabkan karena pemilik usaha kecil ini tidak mendapat diskon pembelian seperti yang didapat dari perusahaan besar.

2.1.6 Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah

Seperti yang dijelaskan pada pengertian usaha kecil dan menengah yang tertuang dalam Keppres RI No. 19 tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada decade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis usaha kecil dan menengah mulai skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk Usaha Kecil dan Menengah :

a. Usaha Kuliner

Salah satu bisnis Usaha Kecil dan Menengah yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

b. Usaha Fashion

Selain makanan, usaha kecil dan menengah di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

c. Usaha Dagang Sembilan Bahan Pokok

Usaha dagang yang menjual bahan-bahan pokok yang di perlukan rumah tangga seperti beras, minyak, gula dan lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Diantara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul, dan Volume Jurnal Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Sunariani, Suryadinatha Dan Mahaputra (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2 No 1 Tahun 2017	Program binaan UMKM dan Analitical Hierarchy process yang dilakukan memberikan hasil maksimal untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Bali. Dengan pemberdayaan tersebut akan memberikan peningkatan secara signifikan pertumbuhan ekonomi pasar domestik dan Internasional di Provinsi Bali. Kendala yang dihadapi UMKM yaitu modal usaha	Persamaan - Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian yaitu UMKM Perbedaan -Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya berada di Kota Bali Sedangkan Penelitian ini bertepatan di pasar Balige Kabupaten Toba

2	<p>Menurut Dahlan (2017). Peran Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1, No. 2, April 2017</p>	<p>Variabel inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, akan tetapi perubahan lingkungan eksternal belum terbukti memperkuat hubungan antara inovasi dengan kinerja UMKM. Untuk itu dipandang perlu, bagi pelaku UMKM khususnya di RW 12</p>	<p>-Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian yaitu UMKM -Perbedaan Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya berada di RW 12 Desa Cipacing, sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan pelaku UMKM di pasar Balige tepatnya di Kabupaten Toba.</p>
3	<p>Irfan (2019) , Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri</p>	<p>Perkembangan usaha mikro selama tahun 2016-2018 , pada tahun 2017 jumlah UMKM sebanyak 99.302 unit, dalam hal ini menunjukkan peningkatan</p>	<p>Persamaan : - Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan menggunakan ruang lingkup</p>

			<p>Pemberdayaan UMKM.</p> <p>Perbedaan : - Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya berada di KCP Sribhawono Lampung Timur , sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan pelaku UMKM di pasar Balige tepatnya di Kabupaten Toba.</p>
--	--	--	--

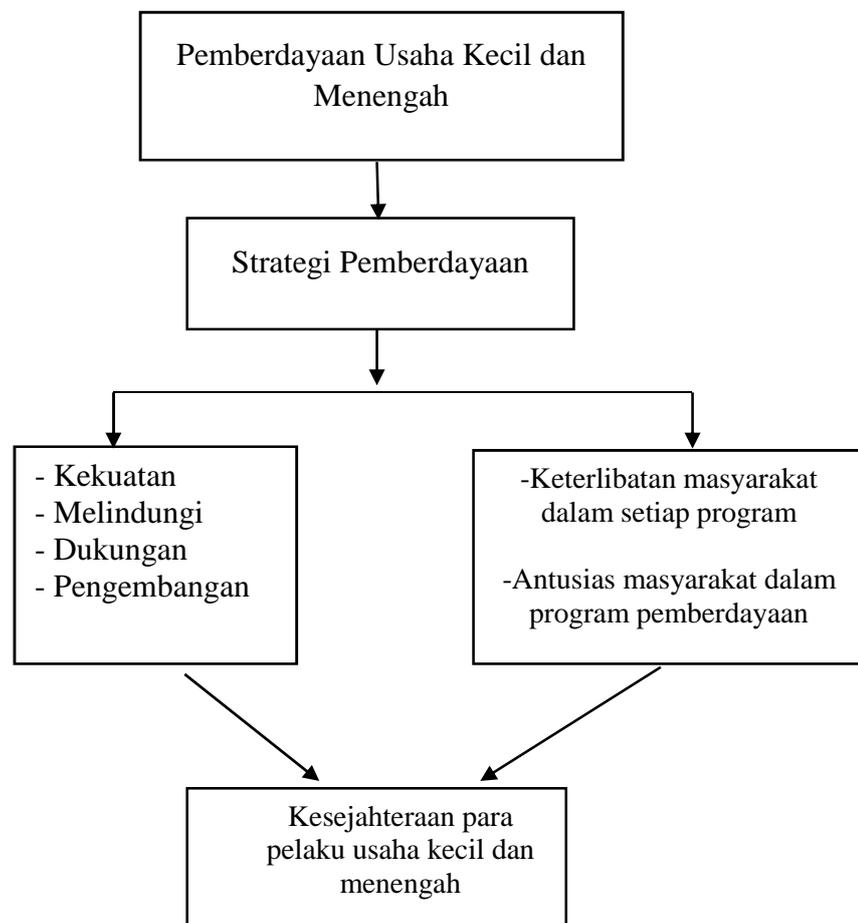
Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, sesuai dengan judul peneliti yaitu “Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan (DISPERINDAG) Dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Pasar Balige, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, memiliki perbedaan mulai dari judul penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian. Namun, beberapa diantaranya terdapat persamaan yaitu metode penelitian kualitatif

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan. Kerangka konsep disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran ini melihat pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Disperindag).

Adapun yang menjadi gambaran dari kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Dari kerangka konseptual diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah, adalah wujud dalam rangka mengakomodir sekaligus memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah agar lebih produktif dalam tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan

Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran Usaha Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Adapun penjelasan bagian dari pemberdayaan pelaku Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

a. Strategi

suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.

b. Pelatihan

Merupakan pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam berbagai macam bentuk, biasanya bentuk-bentuk pelatihan tersebut disesuaikan dengan bidang apa yang dimasuki oleh pelaku usaha tersebut

c. Penyuluhan

Kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan kepada individu atau kelompok dan memberikan informasi-informasi mengenai kepentingan para pelaku usaha kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya

d. Kesejahteraan para pelaku usaha kecil dan menengah

Usaha kecil dan menengah sangat berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat sekitar sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari

e. Keterlibatan masyarakat dalam setiap program

Masyarakat diharapkan dapat terlibat atau mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah agar setiap program yang dibuat bisa berjalan dengan baik

f. Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk itu masyarakat harus memiliki semangat dalam setiap program yang dilaksanakan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek.

Dengan pengertian diatas, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komperhensif.

Menurut Nalom Siagian (2021: 17), pada dasarnya jenis data kualitatif dapat digolongkan menjadi:

a. Data nominal, terjadi bila angka-angka atau simbol-simbol dipakai untuk menggolong-golongkan suatu objek, orang, atau suatu karakteristik. Dalam data nominal, penyusunan skala dalam-kelas merupakan suatu gugus atau rangkaian yang terpisah-pisah atau bebas. Satu-satunya hubungan yang terdapat di antaranya ialah sifat kesamaan, tiap anggota subkelas harus sama keadaannya untuk membentuk satu skala. Karena klasifikasi dalam skala nominal dinyatakan dengan jelas oleh suatu set daripada simbol-simbol maka skala nominal ini dikatakan “unique up to a one-to-one

transformation”. Beberapa simbol yang menyatakan berbagai sub kelas dalam skala sesungguhnya dapat dipertukarkan, asalkan masih dapat dipahami. Simbol tentang jenis kelamin, tentang warna, musim misalnya dapat pertukaran. Sebagai contoh adalah pria di simbolkan sebagai angka 1, wanita sebagai angka 2 , musim kemarau angka 1 dan musim hujan di beri angka 2. Angka – angka simbolik tersebut bukan berarti nilai atau peringkat, melainkan pencirian atau pembeda 18 semata. Dalam hal ini berarti bahwa angka 1 berbeda dengan angka 2, dimana kemarau berbeda dengan penghujan.

b. Data ordinal diberi batasan sebagai objek-objek dalam suatu kategori yang mungkin tidak berbeda dengan objek yang lain tetapi masingmasing objek tersebut tergabung dalam suatu hubungan dinyatakan dalam skala peringkat (Tabachnick & Fidell, 1996). Selanjutnya dapat dikatakan betapa suatu susunan skala ordinal akan memiliki karakter “unique up to a monotonic transformation” . Dalam diskursus ini, suatu hubungan yang mempunyai sifat yang selalu sama. Dalam data ordinal penskalaan dilakukan atas dasar kriteria yang terputus. Ilustrasinya adalah kelompok yang setuju dan tidak setuju, meskipun pembagian tersebut tidaklah tepat, karena konsep setuju tersebut masih bisa di bagi lagi menjadi lebih detail seperti sangat setuju dan setuju. Begitupun dengan tidak setuju, masih ada tingkatan sangat tidak setuju. Jadi ada semacam pemeringkatan atau tingkatan/derajat kualitas pada konsep tersebut.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jl. AB. SILALAH KOMPLEK PERKANTORAN SIMANJALO BALIGE KABUPATEN TOBA. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama delapan bulan mulai dari Januari-Agustus 2022, dengan jadwal sebagai berikut :

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder .

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun cara peneliti untuk mendapatkan data primer, yaitu menggunakan :

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dengan kata lain adalah kegiatan Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini.

2. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dikumpulkan atau data yang sudah tersedia untuk peneliti yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder adalah data olahan yang diperoleh melalui :

1. Dokumen-dokumen

Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, atau pun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan sah

2. Artikel

Artikel ialah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur dan meyakinkan.

3. Jurnal

Jurnal adalah kumpulan artikel dalam bidang ilmu tertentu. Publikasi jurnal biasanya dilakukan secara tim, ada penulis, editor, layouter, dan sebagainya. Jadi jurnal bukan artikel atau paper tunggal yang ditulis, namun publikasi ilmiah kumpulan artikel.

3.4 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi lengkap yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti memerlukan informan guna melengkapi kesempurnaan penelitian, informan tersebut diantaranya adalah :

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.

Berdasarkan pengertian informan kunci diatas, peneliti memutuskan bahwa informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba

2. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dari pengertian informan utama diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan utama dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang berada di Pasar Balige

3. Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan pengertian informan pendukung diatas, peneliti memutuskan bahwa informan pendukung dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pasar dan para pegawai yang berada di Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Toba

3.5 Analisis Data

Secara umum, pengertian analisis data adalah langkah mengumpulkan, menyeleksi, dan mengubah data menjadi sebuah informasi. Kemudian analisis data juga merupakan yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan.

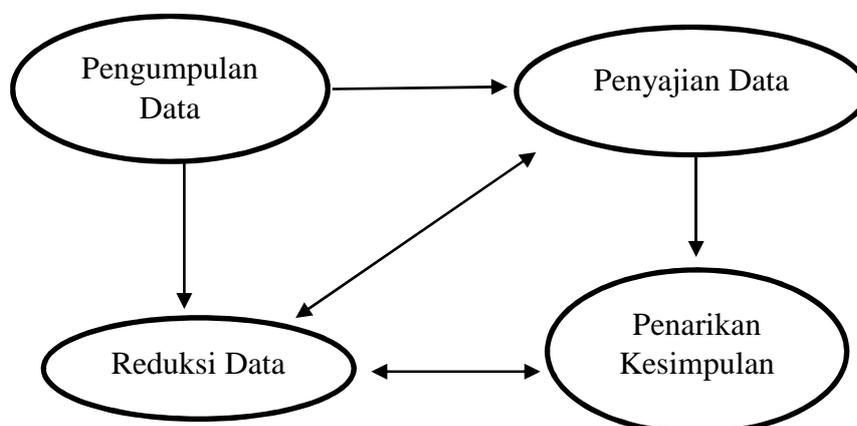
3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Nurdin dan Sri Hartati, 2019:206), menyatakan bahwa:

Analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data menurut mereka adalah kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang terkumpul. Penyajian data diartikan sebagai penyajian informasi yang tersusun. Sedangkan kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.

Analisis data penelitian ini adalah menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Berikut adalah bagan teknik analisis data penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data



Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama maka dilakukan pengumpulan data dengan hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Peneliti melakukan perangkuman dengan memilih dan memilah data dan hal-hal yang pokok dan penting. Caranya ialah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang dibuat (ketika wawancara). Apabila wawancara direkam, maka lakukan transkrip hasil rekaman terlebih dahulu, selanjutnya melakukan pemilahan terhadap informasi yang penting dan tidak penting dengan cara memberi tanda-tanda, kemudian penggalan bahan tertulis yang penting yang sesuai dengan yang dicari, dan penulis menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh informan atau dokumen dalam penggalan tersebut.

3. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu matrik atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah

dipahami adalah cara yang paling penting dan utama dalam menganalisis data kualitatif yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data yang peneliti dapat dari lapangan. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen. Setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan tidak ada kesalahan data, peneliti kemudian mengecek ulang proses reduksi dan penyajian data

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Siagian . Nalom . (2021) . Statiska Dasar (konseptualisasi dan aplikasi), CV.

Kultura Digital Media

Sri Handini, Sukei, Hartati Kanty Astuti (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan UMKM

Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif, dan R&D.
Alfabet Bandung

Jurnal :

Anwar, Etal (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
Tinjauan Manajemen.

Dewanti, Ida Susi (2010) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro : Kendala dan Alternatif Solusinya.

Ondang, F Singkoh, N Kumayas - Jurnal Eksekutif, 2019 Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM) di Kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM)

Nuroini, Wnur Setiawan- Jurnal Abdi Bhayangkara, 2021 Pemberdayaan UKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Yunistina Tirani Wau-Jurnal, 2019 Analisa Strategis Koperasi Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Medan

Widyaiswara Ahli Madya BBPPKS Regional 1 Sumatera, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 10

Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998

Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Skripsi :

Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil, Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros

Pengolahan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan di Kabupaten Lebak

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan

Yulita R.F. Tintingon, Alden Laloma, Deysi Tampongangoy- Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Pasar Pinangsungkulan Karombasan Kota Manado

